

Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi)

Arniwita, Agus Santoso, Endah Tri Kurniasih, Ahmad Soleh

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi

Correspondence email: mas.soleh@yahoo.com

Abstract. *The regional budget is an important instrument in the administration of public services, so that it can provide benefits to the welfare of the community. However, in its implementation there are still many that have not been fulfilled as a result of suboptimal absorption of the budget that impacts government performance. Therefore, the problem of delays in budget absorption and low levels of budget absorption must be addressed immediately. Based on this problem, this research was conducted. The purpose of this study is to analyze the tendency of budget absorption, analyze the factors that influence the absorption of the SKPD expenditure budget in the Jambi Provincial Government, analyze the influence of SKPD expenditure absorption on agency performance and look for appropriate policy strategies in efforts to improve financial and service performance Jambi Provincial Government. The results of the analysis show that 1) when viewed from the total expenditure, all SKPD of the Provincial Government of Jambi tends to experience delays in budget absorption, and when viewed per type of expenditure, 82.61% SKPD tends to experience a delay in absorption of the personnel expenditure budget, all SKPDs tend to experience delays budget absorption of goods and services expenditure, and 43.90% SKPD tend to experience delays in capital expenditure budget absorption; 2) budget planning and budget execution are factors that significantly influence the uptake of the budget while human resource capacity (HR) has no significant effect; 3) budget absorption has a positive and significant effect on agency performance.*

Keywords: *Budget Absorption, Performance of Government Agencies*

PENDAHULUAN

Anggaran belanja daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang penyelenggaraannya diserahkan pada pemerintah daerah. Sehingga dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam PP No.58 Tahun 2005. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum terpenuhi sebagai akibat dari penyerapan anggaran yang belum optimal. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2015 seluruh kabupaten/kota di Indonesia diperkirakan rata-rata sebesar 15 persen anggaran belanja yang tidak terserap oleh masing masing SKPD. Sementara untuk pemerintah Kota Jambi besarnya dana yang tidak terserap sebesar 10,1 persen.

Permasalahan yang menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan diantaranya adalah lambatnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari kompetensi sumberdaya, perencanaan dan kehati-hatian pengambil keputusan (Aini,2016). Sementara menurut Heriyanto (2012) menjadi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran adalah mekanisme pencairan yang panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kondisi perkembngan serapan anggaran belanja SKPD, faktor faktor apasaja yang mempengaruhi serapan anggaran dan pengaruh serapan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jambi serta strategi untuk mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara sementara metode penarikan sampel dengan pendekatan *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini 40 SKPD yang ada dilingkungan pemerintahan Provinsi Jambi. dengan responden para kasubbag perencanaan dan kasubbag keuangan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan model kontribusi, model SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan PLS (*Partial Least Square*) menggunakan *SmartPLS*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi serapan anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015

Hasil laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari SKPD di Provinsi Jambi pada tahun 2015 maka besarnya serapan anggaran per triwulan pada pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jambi

Triwulan	Serapan Anggaran Kumulatif		Serapan Anggaran per Triwulan	
	Rp	%	Rp	%
I (Januari-Maret)	135.681.541.959	7,79	135.681.541.959	7,79
II (April-Juni)	515.550.159.798	29,60	379.868.617.839	21,81
III (Juli-September)	918.013.307.121	52,71	402.463.147.323	23,11
IV (Oktober-Desember)	1.663.360.224.945	91,13	745.346.917.824	40,83

Sumber : Data LRA SKPD 2015 diolah, 2019

Tabel 1 diatas menunjukkan serapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 secara kumulatif cenderung meningkat dari triwulan ke triwulan berikutnya namun terlihat tidak proporsional dan menciptakan penumpukan realisasi anggaran di triwulan akhir. Dalam mengukur serapan anggaran peneliti menggunakan tiga kategori yaitu jika >25% (keterlambatan serapan tinggi), 20-50% (Keterlambatan serapan sedang) dan 50-60% (keterlambatan serapan rendah). Hasil analisis serapan anggaran sampai dengan triwulan ke III menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menalami keterlambatan penyerapan anggaran. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Tingkat Keterlambatan Serapan Anggaran Belanja Triwulan III TA 2015

Tingkat Keterlambatan	Jumlah SKPD	% dari Jumlah SKPD
Tinggi	1	2,17
Sedang	14	30,43
Rendah	31	67,39
Jumlah	46	100

Sumber : Data LRA SKPD 2015 diolah, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil analisis laporan realisasi anggaran per SKPD ternyata 46 SKPD (100 persen) cenderung mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2015 dengan kategori tingkat keterlambatan yang berbeda-beda. Jumlah SKPD yang tingkat keterlambatan penyerapannya tinggi hanya ada 1 SKPD yaitu 2,17 persen dari total SKPD. Kategori tingkat keterlambatan sedang sebanyak 14 SKPD yaitu 30,43 persen dan terdapat 31 SKPD (67,39 persen) dalam kategori rendah dari total 46 SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015. Hasil analisis kecenderungan serapan anggaran belanja menunjukkan bahwa secara kumulatif terjadi kecenderungan rendahnya tingkat serapan anggaran belanja pada triwulan pertama dan kedua. Hal ini memicu tingginya tingkat realisasi di akhir tahun anggaran, ditunjukkan dengan tidak meratanya tingkat penyerapan di setiap triwulannya. Penyerapan anggaran belanja yang tidak merata disebabkan hanya belanja pegawai yang cenderung lebih konsisten terjadi penyerapan di setiap triwulannya. Sedangkan penyerapan selain belanja pegawai kecenderungan tidak merata dalam setiap triwulannya.

Faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil pengolahan dengan menggunakan model PLS maka diperoleh pengaruh langsung antar variabel sebagai berikut:

Tabel 3
Pengaruh langsung antar variabel yang mempengaruhi serapan anggaran.

Hubungan antar variabel		Loading	T test	P Value
Kapasitas SDM	Serapan Anggaran Belanja	-0,111	0,867	0,386
Perencanaan Anggaran	Serapan Anggaran Belanja	0,459	3,902	0,000
Pelaksanaan Anggaran	Serapan Anggaran Belanja	0,324	2,734	0,006
Serapan Anggaran Belanja	Kinerja Instansi	0,516	5,227	0,000

Sumber : data diolah

Adapun faktor yang menjadi Indikator yang dijadikan rujukan sebagai permasalahan yang mempengaruhi serapan anggaran belanja SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi.

a. Kapasitas SDM Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap serapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Jambi. Penyebab pengaruh negatif dan tidak signifikan ini disebabkan oleh a) pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau pendidikan formal atau non formal mengenai pengelolaan keuangan tidak diberikan secara merata untuk semua pegawai sehingga berulang pada orang yang sama, b) SDM yang dimiliki oleh SKPD yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang/jasa telah memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis terkait pengadaan barang/jasa karena pegawai yang ditunjuk setiap tahunnya rata-rata tidak mengalami perubahan, c) semakin sering mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan semakin tidak mau ditunjuk untuk menjadi pengelola keuangan mengingat akan resiko yang cukup tinggi, dan d) sistem administrasi pengelolaan keuangan yang tersistem dengan jaringan aplikasi komputer yang baik pada SKPD mampu mengurangi pengaruh buruknya kualitas SDM seperti penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan aplikasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

b. Perencanaan anggaran

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran belanja SKPD, dimana nilai koefisien regresi 0,459. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi maka akan semakin cepat dan tinggi serapan anggaran belanja SKPD. Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014) bahwa besar kecilnya serapan anggaran belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran dan penetapan APBD.

c. Pelaksanaan Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran belanja, dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,324 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,734. Nilai *t-statistic* variabel pelaksanaan anggaran ini lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 5% yaitu 1,96 sehingga penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dimana semakin baik pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi maka akan semakin cepat dan tinggi pula serapan anggaran belanja SKPD.

Pengaruh serapan anggaran belanja SKPD terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi, dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,516 dan nilai *t-statistic* sebesar 5,227. Nilai *t-statistic* variabel serapan anggaran belanja ini lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 5% yaitu 1,96. Berdasarkan rumusan hipotesis maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. sehingga penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dimana semakin baik serapan anggaran belanja yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi maka akan semakin baik pula kinerja instansi.

Strategi meningkatkan serapan anggaran dan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dari hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja. Artinya pemerintah daerah harus terus melakukan pembenahan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran untuk percepatan serapan anggaran belanja agar peningkatan kinerja instansi dapat tercapai. Kondisi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Menggunakan analisis standar biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran agar anggaran bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan karena saat ini SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi belum mengaplikasikannya

2. Mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung, atau dengan swakelola sehingga dapat dirumuskan pola ideal penyerapan anggaran belanja sesuai dengan sifat masing-masing belanja
3. Menyusun rencana penyerapan anggaran yang disertai dengan rencana pengadaan (*procurement plan*) yang sistematis, rencana penyerapan anggaran tersebut dibuat untuk satu tahun anggaran dan dirinci untuk setiap bulan per jenis belanja sebagai alat untuk memantau pelaksanaan pencapaian kinerja satuan kerja (instansi)
4. Menetapkan target bulanan/triwulanan capaian *output* dan *outcome* (kinerja).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai kondisi yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Hasil analisis kecenderungan serapan anggaran belanja SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 secara umum mengalami keterlambatan.
- 2 Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja secara signifikan sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan.
- 3 Serapan anggaran belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. N. 2016. *Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bantul)*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Fitriany, N., Masdjojo, G.N & Suwarti, T. 2015. Exploring The Factors that Impact The Accumulation of Budget Absorption in The End of The Fiscal Year 2013 : A Case Study in Pekalongan City of Central Java Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol.7, Issue 3 (Aug) ISSN 2289-1560.
- Herriyanto, H. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis. FE Universitas Indonesia : Jakarta.
- Kuswoyo, I. D. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Belanja di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri*. Tesis, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vo.4, No.1, pp.11-19, Februari 2015. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI : Yogyakarta.
- Muchsin, M. & Noor, A.S. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran : Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun?. *Paris Review BPKP* : Yogyakarta.
- Rifai, A., Inapty, B.A & Pancawati M. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.11, No.1 Januari 2016. FEB Universitas Mataram, NTB.
- Ruwaida, D. & Abdullah, S. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* Vol.4, No.4, November 2015, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.
- Siswanto D.A & Rahayu L.S. 2011. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga.
- Soleh, A., Putra, I. E., & Rahayu, Y. 2017. ANALISIS KINERJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI DASAR MENUJU REFORMASI BIROKRASI YANG IDEAL. *Jurnal Development*, 5(2), 110-124.

- Yunarto, I. 2011. Memahami Proses Penganggaran Untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. *Paris Review BPKP* : Yogyakarta.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 5, No.1, pp.11-19, Februari 2016. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.
- Permen RI Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.